

## ANGKA STUNTING RIAU DIPREDIKSI NAIK 7 PERSEN, PEMERINTAH PROVINSI GERAK CEPAT



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/606277/angka-stunting-riau-diprediksi-naik-7-persen-pemprov-gerak-cepat>

Angka stunting di Provinsi Riau pada tahun 2025 ini diprediksi mengalami kenaikan 7 persen atau menjadi 20 persen.

Hal itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang memprediksi angka stunting di Riau bisa naik hingga 20 persen dari tahun sebelumnya hanya 13 persen.

"Itu baru diprediksi, tapi ini belum pasti. Bahwa angka stunting di Riau ada kemungkinan meningkat. Prediksinya kenaikannya sampai 7 persen atau menjadi 20 persen. Itu berdasarkan data SSGI," kata Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, M Job Kurniawan, Kamis (26/6/2025).

Meskipun hal tersebut masih berupa prediksi, namun pihaknya langsung merespon cepat informasi tersebut. Pihaknya juga langsung mengumumkan pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk bersama-sama melakukan pencegahan agar angka stunting di Riau tidak mengalami kenaikan.

"Kami juga sudah kumpulkan para perwakilan kabupaten/kota di Riau untuk membahas hal tersebut. Ini sebagai upaya melakukan pencegahan bersama agar stunting cepat diatasi," ujarnya.

Lebih lanjut Job mengatakan, sebagai upaya pencegahan Pemprov Riau menargetkan kehadiran bayi ke Posyandu bisa mencapai angka 85 hingga 90 persen. Pasalnya, saat ini angka kehadiran bayi ke Posyandu masih sebesar 70 persen.

"Yang harus digencarkan adalah bagaimana seluruh bayi kita hadir ke Posyandu. Sementara, angka kehadiran bayi ke Posyandu pada angka 70 persen. Harusnya bisa lebih baik dari itu. Kita targetkan kehadiran ini bisa meningkat diangka 85 sampai 90 persen. Sehingga kita bisa optimis bahwa semua bayi kita sudah diukur dan dapat dipastikan, itu lebih akurat," terangnya.

Menurutnya, jika 30 persen bayi tidak hadir ke Posyandu, maka intervensi yang dilakukan bisa menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, ia meminta perhatian lebih dari pemerintah desa, kabupaten, juga provinsi terhadap keberadaan Posyandu.

Pemprov Riau juga menekankan pentingnya data bayi *by name by address* di setiap desa. Dengan data tersebut, pemerintah bisa mengetahui bayi mana yang belum datang ke Posyandu dan dapat melakukan kunjungan langsung.

"Maka, kami ingin ada perhatian dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Pemprov atas Posyandu yang ada di tiap desa ada perhatian kita kepada kader PKK dan Posyandu dan bidan desa yang ada di tiap Posyandu," sebutnya.

Job Kurniawan menyatakan kader PKK, bidan desa, dan petugas Posyandu harus aktif menjemput bola. Jika diketahui ada bayi yang tidak hadir, maka mereka harus mengunjungi rumah bayi tersebut untuk mengetahui penyebabnya.

"Kalau ada bayi yang tidak ke Posyandu, saya rasa kita bisa intervensi untuk mendatangi bayinya ke rumahnya, agar tahu alasan orang tua tidak membawa bayinya ke Posyandu," jelasnya.

Langkah ini penting agar penanganan gizi bayi tidak terputus sebab kendala kehadiran bayi di Posyandu. Sehingga dengan pendekatan langsung, angka partisipasi akan meningkat secara signifikan.

"Maka, hal ini perlu koordinasikan dengan baik antara pemerintah kabupaten/kota, dan kecamatan. Maka, kita harus berkomitmen untuk bersama-sama melakukan intervensi," sebutnya.

Dengan dukungan dana APBN serta alokasi dana desa, program Posyandu dan intervensi gizi harus lebih digencarkan. Harapannya, ke depan tidak ada lagi bayi yang luput dari pantauan kesehatan dasar di desa.

"Sasaran *stunting* ini adalah bayi 0 sampai 36 bulan. kita didukung oleh dana APBN melalui Dinas Kesehatan. Lalu, kami juga bantu dari dana desa yang kami salurkan di tiap

desa. Mudah-mudahan, Posyandunya semakin semarak, semua bayi yang ada bisa hadir di Posyandu," tutupnya.

**Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/124806/2025/06/26/angka-stunting-riau-diprediksi-naik-7-persen-pemprov-gerak-cepat/#sthash.Q9ZIYtIB.dpbs>, “Angka Stunting Riau Diprediksi Naik 7 Persen, Pempro Gerak Cepat”, 26 Juni 2025;
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/606277/angka-stunting-riau-diprediksi-naik-7-persen-pemprov-gerak-cepat>, “Angka Stunting Riau Diprediksi Naik 7 Persen, Pemprov Gerak Cepat”, 26 Juni 2025;

**Catatan:**

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan Penurunan Stunting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan

e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.

- a. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- e. audit kasus Stunting.

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan

Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau